

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar	ii
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Singkatan	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian	19
1.4.1. Manfaat Teoritis	19
1.4.2. Manfaat Praktis	19
1.5. Keaslian Penulisan	21
1.6. Sistematika	24
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1. Landasan Teoritis	29

2.1.1. Paradigma	29
2.1.2. Teori Hukum Pembangunan	35
2.1.2.1. Pengembangan Pemikiran <i>Sociological Jurisprudence</i>	38
2.1.2.1.1. Hukum Dalam Masyarakat	46
2.1.2.1.2. Hukum dan Perubahan Masyarakat	51
2.1.2.2. Gagasan Hukum Sebagai Sarana Pembangunan	62
2.1.2.3. Pengaruh Pendekatan Orientasi Budaya	70
2.1.2.4. Pengaruh Pendekatan Orientasi Kebijakan	76
2.1.2.5. Beberapa Prinsip dalam Teori Hukum Pembangunan	82
2.1.2.6. Hubungan dengan Gagasan Negara Kesejahteraan	85
2.1.2.7. Hubungan dengan Pancasila	91
2.1.2.8. Hubungan dengan Nilai Dasar Hukum	99
2.2. Landasan Konseptual	108
2.2.1. Sistem Pendidikan Nasional	110
2.2.2. Pendidikan Tinggi	115
2.2.2.1. Program Pendidikan Tinggi	117
2.2.2.1.1. Akademik	118
2.2.2.1.2. Vokasi	120
2.2.2.1.3. Profesi dan Spesialis	125
2.2.2.2. Lembaga Pendidikan Tinggi	126
2.2.3. Politeknik	128

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	133
3.1. Jenis Penelitian	133
3.2. Bahan Hukum	137
3.2.1. Bahan Hukum Primer	138
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder	142
3.2.3. Bahan Hukum Tersier	143
3.3. Metode Pengumpulan Data	143
3.4. Metode Penyajian Data dan Analisis	145
3.5. Pendekatan Penelitian	146
3.6. Hambatan Penelitian dan Penanggulangannya	149
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	151
4.1. Pengaturan Tentang Kedudukan Hukum Politeknik dalam Sistem Pendidikan Nasional	151
4.1.1. Pengaturan Tentang Politeknik di Indonesia	153
4.1.1.1. Periode Tahun 1950 – 1988	153
4.1.1.2. Periode Tahun 1989 – 2002	168
4.1.1.3. Periode Setelah Tahun 2003	180
4.1.2. Pengaturan Politeknik di Beberapa Negara	193
4.1.2.1. Pengaturan di Swiss	193
4.1.2.2. Pengaturan di Jerman	202
4.1.2.3. Pengaturan di Inggris	211
4.1.2.4. Pengaturan di Singapura	219

4.1.2.5. Pengaturan di Jepang	223
4.1.3. Kedudukan Hukum Politeknik Secara Yuridis Normatif	233
4.2. Implementasi Peraturan Tentang Kedudukan Hukum Politeknik	238
4.2.1. Implementasi Pembaruan Hukum Politeknik	238
4.2.1.1. Implementasi Terhadap Jenis Pendidikan	238
4.2.1.2. Implementasi Terhadap Jenjang Pendidikan	242
4.2.1.3. Implementasi Terhadap Pendidik	247
4.2.1.4. Implementasi Terhadap Proses Pembelajaran	251
4.2.1.5. Implementasi Terhadap Lulusan	256
4.2.2. Faktor Pendukung Implementasi	259
4.2.3. Faktor Penghambat Implementasi	262
4.2.4. Dampak Implementasi Terhadap Kedudukan Hukum Politeknik	273
4.3. Pengaturan Tentang Kedudukan Hukum Politeknik Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Masa Mendatang	278
4.3.1. Penegasan Prinsip Dasar Pendidikan Tinggi Vokasi	282
4.3.2. Pengaturan Kedudukan Hukum Politeknik	320
4.3.3. Pengaturan Pendidikan Vokasi dalam Sistem Pendidikan Nasional	337
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	360
5.1. Kesimpulan	346
5.1.1. Pengaturan Kedudukan Hukum Politeknik dalam Sistem Pendidikan Nasional	361

5.1.2. Implementasi Peraturan tentang Kedudukan Hukum Politeknik	364
5.1.3. Pengaturan tentang Kedudukan Hukum Politeknik di Masa Mendatang (<i>Ius Constituendum</i>)	367
5.2. Saran	375
DAFTAR PUSTAKA	383



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Keterangan	Halaman
4.1	Program Pendidikan Tinggi Periode 1950-1988	167
4.2	Program Pendidikan Tinggi Periode 1989-2002	178
4.3	Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005-2025	182
4.4	Program Pendidikan Tinggi Periode Setelah Tahun 2003	192
4.5	Sistem Pendidikan Tinggi Swiss	196
4.6	Sistem Pendidikan Tinggi Jerman	204
4.7	Sistem Pendidikan Tinggi Baden-Wuerttemberg	208
4.8	Sistem Pendidikan Tinggi Inggris	217
4.9	Sistem Pendidikan Tinggi Singapura	221
4.10	Sistem Pendidikan Tinggi Jepang	228
4.11	Perkembangan Jumlah Politeknik Tahun 2000-2019	275
4.12	Komposisi Politeknik di Indonesia Tahun 2018-2019	276
4.13	Pertumbuhan Lulusan Politeknik Tahun 2002 – 2019	277
4.14	Kerangka Teoritis Hukum Sebagai Sarana Pembangunan	280
4.15	Konstruksi Pembaruan Hukum Terhadap Politeknik	281
4.16	Hubungan Pendidikan Teoritis dan Praktis	293
4.17	Pendidikan Akademik dan Vokasi	294
4.18	Pendidikan Ilmu Terapan	294
4.19	Pendidikan Ilmu Terapan di Swiss dan Jerman	296
4.20	Pendidikan Ilmu Terapan di Inggris, Singapura dan Jepang	297
4.21	Pendidikan Ilmu Terapan di Indonesia	298
4.22	Kebijakan Dasar Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia dan Pengaturannya Dalam Lintasan Waktu	300
4.23	Alternatif Perumusan Kembali Prinsip Dasar Pendidikan Vokasi	310
4.24	Penelitian Berdasarkan Skala Tingkat Kesiapan Teknologi	311
4.25	Jenis Penelitian Berdasarkan Tingkat Kesiapan Teknologi	312
4.26	Klasifikasi Jenis Pendidikan Berdasarkan Jenis Penelitian	313
4.27	Penataan Jenis Pendidikan Tinggi	314
4.28	Pendidikan Tinggi Profesional	315
4.29	Penataan Jenjang Program Pendidikan Tinggi Vokasi	318

4.30	Bentuk Perguruan Tinggi dan Jenis Pendidikan Dalam UU Dikti 2012	328
4.31	Alur Pengembangan Kebijakan Untuk Kedudukan Hukum Baru Politeknik	329
4.32	Kedudukan Hukum Politeknik (Alternatif Pertama)	330
4.33	Kedudukan Hukum Politeknik (Alternatif Kedua)	331
4.34	Struktur Perguruan Tinggi dengan Kedudukan Hukum Politeknik (Alternatif Kedua)	332
4.35	Hubungan Pendidikan Vokasi dengan Kegiatan Perekonomian	340
4.36	Beberapa Alternatif Model Pengaturan Pendidikan Vokasi	344
4.37	Pengaturan Ideal Pendidikan Vokasi dalam Sistem Pendidikan Nasional	356



DAFTAR TABEL

Nomor	Keterangan	Halaman
1.1	Beberapa Penelitian Tentang Hukum Pendidikan Tinggi dan Politeknik	22
4.1	Bentuk Perguruan Tinggi, Jenis Pendidikan dan Jenjang Program Periode 1950-1988	168
4.2	Bentuk Perguruan Tinggi, Jenis Pendidikan dan Jenjang Program Periode 1989-2002	178
4.3	Bentuk Perguruan Tinggi, Jenis Pendidikan dan Jenjang Program Periode Setelah Tahun 2003	192
4.4	Perjalanan Politeknik Dalam Lintasan Waktu	234
4.5	Hasil Penelusuran Komparatif	235
4.6	Beberapa Pasal Yang Menimbulkan Kerancuan	274
4.7	Perubahan Pengertian Pendidikan Vokasi Sejak 1973	282
4.8	Perbandingan Pendidikan Tinggi Vokasi	283
4.9	Konfigurasi Kebijakan Dasar Pendidikan Tinggi Vokasi Masa Mendatang	309
4.10	Perbandingan Kementerian Pengatur Pendidikan Vokasi	342

DAFTAR SINGKATAN

APII	: Asosiasi Politeknik dan Industri Indonesia
ATMI	: Akademi Tehnik Mesin Industri
ATPUT	: Akademi Teknik Pekerjaan Umum dan Tenaga
BAG 1982	: <i>Berufsakademie Act 1982</i>
CEDEFOP	: <i>Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle</i>
CNAA	: <i>The Council for National Academic Awards</i>
Depdikbud	: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Depdiknas	: Departemen Pendidikan Nasional
Dikti	: Pendidikan Tinggi
EDK	: <i>The Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education</i>
FLE 1947	: <i>The Fundamental Law of Education 1947</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
HRG 1976	: <i>Higher Education Framework Act 1976</i>
ITB	: Institut Teknologi Bandung
ITE	: <i>Institute of Technical Education</i>
ITS	: Institut Teknologi Sepuluh-Nopember
JEED	: <i>Japan Organization for Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers</i>
JICA	: <i>Japan International Cooperation Agency</i>
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemendiknas	: Kementerian Pendidikan Nasional
Kemenristekdikti	: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
KKNI	: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KMK	: <i>The Conference of German Ministers of Education</i>
Kosen	: <i>Koto Senmon Gakko</i>
LAPT	: Lembaga Akademi Pendidikan Teknik
LHG 2005	: <i>State Law on Higher Education 2005</i>
MEME	: <i>Multi-Exit Multi-Entry</i>
MEXT	: <i>Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology</i>
MHLW	: <i>Ministry of Health, Labor and Welfare</i>
NITEC	: <i>National Institute of Technical Education Certificate</i>
NIAD-QE	: <i>The National Institution for Academic Degree and Quality Enhancement of Higher Education</i>
PEDC	: <i>Polytechnic Education Development Center</i>

PENS	: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Permendikbud	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Permendiknas	: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Permenristekdikti	: Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Perpres	: Peraturan Presiden
PP	: Peraturan Pemerintah
PTKL	: Perguruan Tinggi Kementerian Lain
Repelita	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Sisdiknas	: Sistem Pendidikan Nasional
SEAMEO-Voectech	: <i>The Southeast Asia Ministers of Education Organization - Centre for Vocational and Technical Education and Training</i>
SEL 1947	: <i>School Education Law 1947</i>
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SNPT	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
TESDA	: <i>Technical Education and Skills Development Authority</i>
TVET	: <i>Technical and Vocational Education and Training</i>
UI	: Universitas Indonesia
UNDIP	: Universitas Diponegoro
UNESCO	: <i>The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UNEVOC	: <i>UNESCO on Vocational Education</i>
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
VPET	: <i>Vocational and Professional Education and Training</i>
VPETA	: <i>Vocational and Professional Education and Training Act</i>